



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR**

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN
DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN 2023**

**PROVINSI SUMATERA UTARA
KOTA PEMATANG SIANTAR**



**PEMATANGSIANTAR
TAHUN 2024**

B A B I

P E N D A H U L U A N

1.1 Penjelasan Umum Organisasi

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimasi sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pemerintah Daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah diwajibkan untuk Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kinerja Organisasi Perangkat Daerah serta Pemerintah Daerah sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Pematangsiantar menyusun LAKIP Tahun 2024 sebagai media pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2023. Dengan adanya laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja BPKPD Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2023, dapat mempertanggungjawabkan kinerja kepada para pihak yang berkepentingan (stakeholder), dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (good

governance) yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas, serta sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja internal BPKPD untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di tahun selanjutnya.

Struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pematangsiantar dibentuk sesuai dengan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar Tanggal 30 Desember 2022, Serta Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pematangsiantar mengemban tugas membantu Walikota Pematangsiantar di Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

1.2 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

Struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pematang Siantar dibentuk sesuai dengan Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar Tanggal 30 Desember 2022.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah. Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan keuangan daerah yang mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan lingkup APBD yang mencakup pendapatan dan/atau penerimaan, pengeluaran serta pembiayaan daerah;
- b. pengelolaan kas non anggaran yang mencakup penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

ada dan/atau perjanjian dengan pihak ketiga menjadi tugas/tanggung jawab badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah;

- c. pengelolaan kekayaan daerah maupun kekayaan pihak lain dan atau investasi yang dikuasakan kepada daerah yang mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan/pengadaan, optimalisasi, pelaporan dan pertanggung jawaban;
- d. manajemen internal badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah;
- e. pembinaan dan pengendalian terhadap UPTD di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah ;
- f. asistensi terhadap wali kota dalam rangka pembuatan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan di tingkat daerah di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah terdiri atas:

(1) Kepala Badan;

(2) Sekretariat, terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Subbagian Keuangan

(3) Bidang pendapatan I, terdiri atas:

- a. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan;
- b. Sub Bidang Penetapan dan Penagihan

(4) Bidang pendapatan II, terdiri atas:

- a. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan;
- b. Sub Bidang Penetapan dan Penagihan

(5) Bidang Anggaran, terdiri atas:

- a. Sub Bidang Anggaran I
- b. Sub Bidang Anggaran II

(6) Bidang Perbendaharaan, terdiri atas:

- a. Sub Bidang Kas Daerah dan Pembiayaan;
- b. Sub Bidang Pengelolaan Belanja

(7) Bidang Akuntansi, terdiri atas:

- a. Sub Bidang Evaluasi dan Pembukuan
- b. Sub Bidang Pencatatan dan Pelaporan Pendapatan dan Pembiayaan Daerah

(8) Bidang Pengelolaan Kekayaan Daerah, terdiri atas:

- a. Sub Bidang Pendataan dan Aset Daerah;
- b. Sub Bidang Pemeliharaan, Perawatan dan Optimalisasi Aset

(9) UPTD

(10) Kelompok JF

Berikut Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pematangsiantar.



1.3 Data Umum Organisasi

Jumlah pegawai per 31 Desember 2022 untuk mendukung pelaksana tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pematang Siantar adalah sebanyak 127 orang dengan rincian sebagai berikut :

a. Menurut Jenis Kepegawaian :

- Pegawai Negeri Sipil (PNS)	:	90	Orang
- Tenaga Harian Lepas (THL)	:	<u>38</u>	Orang
Jumlah	:	128	Orang

b. Menurut Tingkat Pendidikan :

PNS :

- Magister (S-2)	:	10	Orang
- Sarjana (S-1)	:	57	Orang
- Sarjana Muda	:	6	Orang
- SLTA	:	16	Orang
- SLTP	:	1	Orang
- SD	:	-	Orang

THL			
- Magister (S-2)	:	-	Orang
- Sarjana (S-1)	:	19	Orang
- Sarjana Muda	:	4	Orang
- SLTA	:	14	Orang
- SLTP	:	1	Orang
- SD	:	-	Orang

c. Pangkat/Golongan :

- Golongan IV	:	8	Orang
- Golongan III	:	65	Orang
- Golongan II	:	16	Orang
- Golongan I	:	1	Orang

d. Gender :

- Perempuan	:	69	Orang
- Laki-Laki	:	59	Orang

1.4 Isu Strategis

Isu strategis pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar adalah :

1. Hambatan Dalam Organisasi

- a. Kapasitas Sumber daya aparatur yang masih terbatas baik kualitas maupun kuantitas.
- b. Kurangnya sarana transportasi, kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) bagi petugas lapangan.
- c. Pagu anggaran terbatas, kurang mendukung pelaksanaan kegiatan.
- d. Kurangnya sosialisasi produk hukum.
- e. Lemahnya penerapan sanksi terhadap wajib pajak seperti surat paksa, sulit untuk dilaksanakan

2. Hambatan dari Luar Organisasi

- a. Keinginan dan Kemauan SKPD berperan aktif dalam peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah guna mendapatkan Opini Penilaian BPK dengan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
- b. Keterlambatan pengesahan APBD sehingga mempengaruhi pelaksanaan program kerja.
- c. Kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban.
- d. Regulasi yang selalu berubah sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi.
- e. Masih rendahnya pemahaman tentang pengelolaan keuangan pada *Stake holder* maupun SKPD lainnya sehingga terjadi keterlambatan dalam penganggaran maupun pengelolaan keuangan.

3. Upaya-upaya dalam Pemecahan Masalah yang dihadapi

- a. Mengadakan evaluasi kinerja serta memberikan bimbingan secara langsung dari pimpinan terhadap anggota guna peningkatan kualitas sumber daya aparatur serta penyelesaian pekerjaan diharapkan lebih efektif dan efisien.
- b. Memberikan upah pungut berupa insentif (stimulant) sebagai perangsang guna meningkatkan kinerja pegawai.
- c. Mengajukan rencana kegiatan di tahun anggaran disertai program/ kegiatan tahun lalu yang belum tertampung di APBD, sehingga struktur APBD lebih baik.
- d. Menghimbau wajib pajak agar konfirmasi langsung ke Badan Pengelola Keuangan Daerah baik dalam pembayaran maupun hal lain yang berhubungan dengan pajak sehingga komunikasi public berjalan dengan baik.
- e. Mengadakan sosialisasi menyertakan pegawai untuk mengikuti bimbingan teknis dalam hal pajak daerah, penatausahaan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, ditentukan isu strategis pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pematangiantar sebagai berikut :

1. APBD Baik;
2. Penggunaan Waktu (Jam Kerja) Efektif dan Produktif
3. Komunikasi dengan Publik Baik

1.5 Landasan Hukum

LAKIP Badan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar;
9. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 10. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2023.
 11. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar.
 12. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 29 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

1.6 Sistematika Penyajian

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Latar Belakang, Gambaran Umum, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi, Data Umum Organisasi, Isu Strategis yang dihadapi Perangkat Daerah, Landasan Hukum dan Sistematika Penyajian.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan kinerja yang meliputi Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahun 2023, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini menggambarkan akuntabilitas kinerja yang terdiri atas Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran yang mendukung terwujudnya kinerja yang akuntabel.

BAB IV PENUTUP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar yang selanjutnya disebut dengan Renstra BPKPD Kota Pematangsiantar adalah dokumen perencanaan BPKD Kota Pematangsiantar untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra BPKPD Kota Pematangsiantar merupakan rumusan pernyataan visi, misi, tujuan, dan sasaran, strategi, dan arah kebijakan. BPKPD Kota Pematangsiantar disusun untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan Pemerintah Kota Pematangsiantar. Renstra BPKPD Kota Pematangsiantar memuat Rencana Kerja BPKD Kota Pematangsiantar tahunan selama 5 (lima) tahun, yang merupakan terjemahan lebih rinci dari pelaksanaan tugas dan fungsi BPKPD Kota Pematangsiantar secara keseluruhan.

Visi dan misi Kota Pematang Siantar yang dituangkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2022-2027 yang akan menjadi pedoman untuk semua kegiatan pemerintahan. Visi 5 tahun kedepan adalah

**“Terwujudnya Kota Pematang Siantar Sehat, Sejahtera
dan Berkualitas”**

Yang dimaknai dengan :

Sehat : Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara jasmani dan rohani melalui ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan harmonisasi kehidupan masyarakat, serta penyediaan infrastruktur dan tenaga kesehatan mulai dari level bawah, serta melakukan gerakan masyarakat sehat dengan upaya-upaya preventif dan kuratif sejak dini guna menjamin kehidupan yang nyaman dan berkelanjutan, khususnya masa dan atau paska Pandemic Covid-19.

Sejahtera : Meningkatkan potensi sumberdaya manusia (SDM) yang maju dan unggul serta berdaya saing melalui peningkatan SDM dan pengelolaan sumber daya alam yang ada, melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa, responsif serta konsisten dalam melayani, implementasi regulasi dan kebijakan pembangunan menurut skala prioritas, sebagai kota transit, serta mewujudkan daya tarik sebagai Subpusat Perdagangan Regional Sumatera Utara bagi hinterland.

Berkualitas : Meningkatkan potensi sumberdaya manusia (SDM) yang maju dan unggul serta berdaya saing melalui peningkatan SDM dan pengelolaan sumber daya alam yang ada, melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa, responsif serta konsisten dalam melayani, implementasi regulasi dan kebijakan pembangunan menurut skala prioritas, sebagai kota transit, serta mewujudkan daya tarik sebagai Subpusat Perdagangan Regional Sumatera Utara bagi hinterland.

Visi tersebut diatas tentunya diarahkan kepada keberlanjutan program pembangunan dengan menuntaskan program-program pembangunan yang belum dapat dituntaskan pada periode lalu, serta melanjutkan program-program pembangunan yang sudah dilaksanakan dengan merumuskan program baru yang bersifat terobosan baru dan yang mengalami hambatan pelaksanaan pada periode lalu.

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas dirumuskanlah misi Pemerintah Kota Pematang Siantar, sebagai berikut:

1. Memperkuat kehidupan masyarakat yang sehat, sejahtera, humanis, agamis dan beradab dengan menghargai local wisdom dan keberagaman yang berkualitas.

Bertujuan meningkatkan kesehatan, sehat jasmani dan rohani, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas, dan merata serta membentuk masyarakat yang kondusif, berbudaya dan menjamin masyarakat mendapat pelayanan dasar sesuai dengan standar

2. Memperkuat dan memulihkan perekonomian regional, kesehatan iklim usaha perdagangan dan jasa, UMKM dan koperasi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan yang terdampak masa pandemi dan atau paska pandemi Covid-19.

Bertujuan menjawab permasalahan di bidang ekonomi, khususnya mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat yang merata untuk bangkit pada masa dan pasca pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi yang memperhatikan lapangan usaha utama dan pendukung lainnya sebagai penopang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat

3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsif melayani berdasarkan prinsip good governance dan corporate governance.

Bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat dengan penerapan birokrasi yang cepat, tepat, baik secara digital dan langsung dengan pelayanan yang profesional

4. Memperkuat sentralitas dan daya tarik kota, guna pencapaian Siantar sebagai sub pusat perdagangan dan jasa regional di Provinsi Sumatera Utara.

Bertujuan untuk mewujudkan cita-cita Kota Pematang Siantar sebagai sub pusat perdagangan dan jasa di Provinsi Sumatera Utara dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah

5. Mewujudkan Kota berkualitas melalui penataan ruang, pengembangan infrastruktur, keindahan dan kebersihan lingkungan kota secara berkelanjutan.

Bertujuan untuk membangun infrastruktur kota yang berkualitas dengan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan pola dan struktur ruang yang berwawasan lingkungan berkelanjutan.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra BPKPD Kota Pematangsiantar dengan Dokumen RPJMD Kota Pematang siantar Tahun 2022-2027, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah

tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja BPKPD Kota Pematangsiantar harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan BPKPD yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, BPKPD berkontribusi sebagai pendukung, penunjang dan pengarah terwujudnya seluruh visi, misi, tujuan dan sasaran Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana tercantum dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh BPKPD Kota Pematangsiantar, yaitu sebagai institusi perencanaan pembangunan. BPKPD Kota Pematangsiantar untuk tahun 2022-2027 mendukung visi dan misi Wali Kota Pematangsiantar, terutama pada misi ke 3 (tiga) yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsif melayani berdasarkan prinsip *good governance* dan *coorporate governance*.

Tabel
Tujuan dan Sasaran BPKPD dalam Pencapaian Visi dan Misi RPJMD
Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027

RPJMD							RENSTRA		
No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsif melayani berdasarkan prinsip <i>good governance</i> dan <i>corporate governance</i>	Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kemampuan keuangan daerah	Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)	Meningkatkan tata kelola Keuangan, Pendapatan dan aset daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Meningkatnya kemampuan keuangan daerah	Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)
								Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan SAP	Persentase Dokumen Keuangan yang disusun tepat waktu
								Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan dan pemanfaatan BMD	Persentase aset tanah Kota yang bersertifikat
									Persentase perangkat daerah yang menaushahkan

No	RPJMD					RENSTRA			
	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
									aset sesuai dengan SAP
								Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat (Wajib Pajak Daerah)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh BPKPD Kota Pematangsiantar dalam menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) BPKPD Kota Pematangsiantar tahun 2022-2027.

Indikator Kinerja Utama BPKPD Kota Pematangsiantar

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1.	Meningkatnya kemampuan keuangan daerah	Indeks IPKD	(43-47)
		Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)	14,88
2.	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase Dokumen Keuangan yang disusun tepat waktu sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	100
		Persentase dokumen yang dipublikasikan terhadap informasi keuangan daerah	100
3.	Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan dan pemanfaatan BMD	Persentase aset tanah Kota yang bersertifikat	19,01
		Persentase perangkat daerah yang menatausahakan aset sesuai dengan SAP	100
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat (Wajib Pajak Daerah)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78

2.3 Rencana Kinerja Tahun 2023

Rencana Kinerja (*Performance Plan*) merupakan target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target Kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, pada sasaran strategik maupun kegiatan yang merupakan tolak ukur proses keberhasilan organisasi yang dilakukan diakhir periode pelaksanaan.

Rencana Kinerja Tahun 2023 ini merupakan komitmen organisasi untuk mencapai kinerja yang optimal sebagai upaya melaksanakan misi organisasi. Dengan demikian, seluruh perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pematangsiantar yang dapat ditunjukan Program/Kegiatan Rencana Kinerja 2023.

Sasaran Program/Kegiatan Tahun 2023, yang telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja sebagai berikut :

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dalam rangka Visi-Misi yang tercantum didalam RPJMD Kota pematangsiantar Tahun 2022-2027. Dibawah ini di sajikan tabel Perjanjian Kinerja Badan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pematangsiantar dan akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2023. terlampir.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja telah dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pematangsiantar dengan berpedoman pada Perubahan Perjanjian Kinerja BPKPD Kota Pematangsiantar Tahun 2023. Penilaian ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Wali Kota Pematangsiantar yang menjadi tugas BPKPD Kota Pematangsiantar. Capaian kinerja sasaran BPKPD Kota Pematangsiantar Tahun 2023 diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis Tahun 2023. Penilaian dilakukan dengan memberikan peringkat capaian kinerja sesuai dengan kategori kinerja, yaitu :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
$91 \% \leq 100 \%$	Sangat Tinggi
$76 \% \leq 90 \%$	Tinggi
$66 \% \leq 75 \%$	Sedang
$51 \% \leq 65 \%$	Rendah
$\leq 50 \%$	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri No. 86 Tahun 2017

Indikator kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis BPKPD Kota Pematangsiantar beserta target capaian realisasinya. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerjanya dengan rincian sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pematangsiantar telah dapat melaksanakan tugas yang merupakan tanggung jawab organisasi terhadap tercapainya perjanjian kinerja yang ditetapkan pada pada Tahun 2023, sebagaimana table dibawah ini

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya kemampuan keuangan daerah	Indeks IPKD	(43-47)	55.15	C
		Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)	14,88	15,57	103,87
2.	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase Dokumen Keuangan yang disusun tepat waktu sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	100	100	100
		Persentase dokumen yang dipublikasikan terhadap informasi keuangan daerah	100	66.67	66.67
3.	Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan dan pemanfaatan BMD	Persentase aset tanah Kota yang bersertifikat	19,01	40,13	211,09
		Persentase perangkat daerah yang menatausahakan aset sesuai dengan SAP	100	100	100
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat (Wajib Pajak Daerah)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100	87,45	87,45

Keberhasilan dan hambatan dalam pencapaian target kinerja yang terpenuhi Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Meningkatnya kemampuan keuangan daerah.

a. Indeks IPKD

Indikator sasaran meningkat sebesar 55,15 dari target sebesar 47, dengan nilai capaian C. hal ini tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.3-387 Tahun 2023 Tanggal 15 Desember 2023, Tentang Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2022.

b. Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)

Capaian terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal rasio PAD sebesar 15,57%, dari target yang direncanakan sesuai dengan RPJMD sebesar 14,88% dari nilai APBD. Pendapatan asli daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun 2023 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 sebesar Rp 150.640.864.207,00 dari Total APBD sebesar Rp 967.665.805.633,00 (LRA terlampir)

Pendapatan Kota Pematangsiantar dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, Tereboson yang dilakukan Pemerintah Kota Pematangsiantar melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Kota Pematangsiantar guna meningkatkan pencapaian target yakni berusaha untuk mencari minat Wajib Pajak dengan membuat Luckydraw yang seadanya seperti payung, pulpen, mangkuk. Pemerintah Kota Pematangsiantar terus melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah. Sehingga pada Tahun 2023, capaian realisasi Pajak Daerah sebesar Rp. 82.887.630.340,00 (99,50%) dari target sebesar Rp. 83.300.000.000,00

2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

- a. Persentase Dokumen Keuangan yang disusun tepat waktu sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Capaian terhadap indikator ini 100%, tahapan penyusunan APBD serta Penjabarannya dan Penyusunan Pertanggungjawaban APBD dilaksanakan dengan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dimana Perda APBD Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2023 Nomor 8 Tahun 2022 dan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan pada Tanggal 30 Desember 2023.

Pada Tahun 2023 Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar

- b. Persentase dokumen yang dipublikasikan terhadap informasi keuangan daerah.

Untuk indikator Persentase dokumen yang dipublikasikan terhadap informasi keuangan daerah adalah 66,67%. Perda APBD TA. 2023 dan Perwa Penjabaran APBD TA. 2023 telah dipublikasikan pada website Pemerintah Kota Pematangsiantar, link <https://berita.pematangsiantar.go.id/?p=6170>.

3. Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan dan pemanfaatan BMD.

- a. Persentase aset tanah Kota yang bersertifikat

Untuk Persertifikatan tanah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sampai pada Tahun 2023 sebanyak 1.248 sertifikat dari 3.110 tanah yang harus disertifikat yaitu sebesar 40,13%. Hal tersebut melebihi target yang dicapai sebesar 19,01%.

- b. Persentase perangkat daerah yang menatausahakan aset sesuai dengan SAP;

Untuk indikator perangkat daerah yang menatausahakan asset sesuai SAP adalah 100%. Seluruh OPD pada Pemerintah Kota Pematangsiantar

23

telah manatausahakan asset dengan menggunakan aplikasi. Sehingga penyajiannya pada laporan keuangan telah diyakini oleh BPK. Untuk tahun anggaran 2023 ini masih tahap penyusunan laporan guna penyerahan kepada BPK untuk di audit.

4. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat (Wajib Pajak Daerah).

Untuk mengetahui perkembangan kinerja dalam hal pelayanan pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pematangsiantar, maka diperlukan adanya survey tingkat kepuasan masyarakat. Namun tahun 2023, indikator sasaran SEBESAR 87,45 %. Responden terdiri dari 149 Orang, yang terdiri dari Jenis Kelamin Laki-Laki sebanyak 105 orang dan Perempuan sebanyak 44 Orsng. Indeks Kepuasan masyarakat dapat dinyatakan Baik.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2022			REALISASI TAHUN 2023		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya kemampuan keuangan daerah	Indeks IPKD	(40-43)	68.82	B	(43-47)	55.15	C
		Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)	14.54	14.35	98,69	14,88	15,57	103,87
2.	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase Dokumen Keuangan yang disusun tepat waktu sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	100%	100%	100%	100	100	100
		Persentase dokumen yang dipublikasikan terhadap informasi keuangan daerah	100%	100%	100%	100	66,67	66,67
3.	Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan dan	Persentase aset tanah Kota yang bersertifikat	15,51%	27,01%	174,15%	19,01	40,13	211,15

	pemanfaatan BMD	Persentase perangkat daerah yang menatausahakan aset sesuai dengan SAP	100%	100%	100%	100	100	100
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat (Wajib Pajak Daerah)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100%	-	-	100	-	-

Dari tabel diatas dapat dijelaskan persentase Capaian Kinerja pada Indikator Derajat Desentralisasi Fiskal mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2022 mencapai 98, 49 % dan pada Tahun 2023 mencapai 103, 87% dari target yang telah direncanakan.

Untuk Persentase Capaian Kinerja pada Indikator Persentase Dokumen Keuangan yang disusun tepat waktu sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah mencapai 100%, dimana seluruh laporan keuangan ditetapkan dan disusun tepat waktu, sedangkan untuk capaian indikator Persentase dokumen yang dipublikasikan terhadap informasi keuangan daerah tingkat capaian sedang, dimana persentase capaian sebesar 66,67%.

Pada capaian kinerja indikator Persentase aset tanah Kota yang bersertifikat mengalami peningkatan yang signifikan, dimana persentase tahun 2022 sebesar 174,15% dan pada Tahun 2023 sebesar 211,15. Hal tersebut disebabkan banyaknya jumlah sertifikat yang terbit pada Tahun 2023 sebesar 400 sertifikat.

Untuk capaian kinerja indikator Persentase perangkat daerah yang menatausahakan aset sesuai dengan SAP adalah 100%, BPKPD telah melakukan rekonsiliasi aset kepada seluruh OPD agar menatausahakan aset sesuai dengan SAP.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET RPJMD	REALISASI TAHUN 2023		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Indeks IPKD	(43-47)	(43-47)	55.15	C
2	Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)	14.88	14,88	15,57	103,87
3	Persentase Dokumen Keuangan yang disusun tepat waktu sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	100%	100	100	100
4	Presentase dok yang dipublikasikan terhadap informasi keuangan daerah	100%	100	66,67	66,67
5	Persentase aset tanah Kota yang bersertifikat	19,01%	19,01	40,13	211,09
6	Persentase perangkat daerah yang menatausahakan aset sesuai dengan SAP	100%	100	100	100
7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100%	78	87,45	112,11

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

Tidak ada.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

Beberapa faktor penyebab Keberhasilan pencapaian Kinerja pada organisasi BPKPD sebagai berikut :

- a. Meningkatnya komitmen pimpinan dan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan di Kota Pematangsiantar, hal tersebut didukung dengan ketersediaan anggaran guna mendukung capaian kinerja.
- b. ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan kebutuhan pegawai.

Factor penyebab kegagalan pencapaian target kinerja adalah kurangnya kepedulian dan kesigapan sumber daya aparatur dalam melaksanakan program kegiatan, terutan dalam pencapaian target kinerja, sehingga rencana kerja terabaikan atau tidak dilaksanakan.

- b. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi memerlukan strategi persepsi khusus dalam bentuk kebijaksanaan strategi pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pematang Siantar yang menetapkan beberapa kebijakan-kebijakan dapat menjadi pedoman-pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain :

- 1) Menyusun Strategi dan mekanisme intensifikasi pemungutan pajak-pajak daerah untuk pencapaian target PAD.
- 2) Melakukan koordinasi dengan unit kerja pengelola sumber pendapatan lainnya secara rutin dan berkala, dengan cara mengadakan rapat-rapat koordinasi PAD.

- 3) Meningkatkan, pengembangan sistem dan prosedur administrasi pengelolaan keuangan daerah.
- 4) Penempatan aparatur sesuai pengalaman pendidikan dan jenjang karier.
- 5) Pemberian penghargaan/insentif bagi aparatur untuk menunjang kreatifitas dan peningkatan kinerja.
- 6) Meningkatkan pengelolaan aset daerah sebagai sarana pendukung pelaksanaan otonomi daerah.
- 7) Meningkatkan kualitas SDM dengan cara mengikutsertakan pegawai dalam mengikuti bimbingan teknis yang berhubungan dengan pajak daerah, penatausahaan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI (Rp.)	%
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Terselesainya Ganti Kerugian dan Santunan Tanah	100,00	48,29	48,29
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	85,57	85,57
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	100,00	64,20	64,20
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100,00	74,92	74,92
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	100,00	89,74	89,74

B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran atas Program, Kegiatan dan Sub kegiatan sebagai berikut :

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Terselesainya Ganti Kerugian dan Santunan Tanah	24.116.260.983,00	11.645.685.439,00	48,29
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah	24.116.260.983,00	11.645.685.439,00	48,29
2.10.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keperluan gedung/kantor Pemko Pematang Siantar, Jumlah sertifikat tanah milik Pemko	24.116.260.983,00	11.645.685.439,00	48,29
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	41.286.763.941,00	35.330.309.411,00	85,57
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100.503.699,00	51.300.975,00	51,04
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja	100.503.699,00	51.300.975,00	51,04
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Administrasi Keuangan	34.300.870.620,00	29.411.875.466,00	85,75
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan aparatur PNS yang dibayarkan	32.491.710.205,00	27.813.171.885,00	85,60

5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tugas administrasi tambahan yang dibayar	1.515.135.413,00	1.351.753.695,00	89,22
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan SPP/SPM yang diverifikasi	272.609.572,00	245.446.008,00	90,04
5.02.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen untuk Tindak Lanjut Temuan BPK	21.415.430,00	1.503.878,00	7,02
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.248.607.242,00	2.844.595.426,00	87,56
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1.242.740.284,00	1.115.588.047,00	89,77
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan rumah tangga yang disediakan	63.983.650,00	48.029.700,00	75,07
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan bahan Logistik kantor yang disediakan	64.982.000,00	64.047.545,00	98,56
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1.146.904.540,00	966.249.205,00	84,25
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	494.980.474,00	467.081.169,00	94,36
5.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Arsip yang dikelola	235.016.294,00	183.599.760,00	78,12
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.984.127.380,00	2.564.659.774,00	85,94
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa yang dibayarkan setiap bulannya	535.760.460,00	278.163.645,00	51,92
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pelayanan jasa yang dibayarkan setiap bulan	2.448.366.920,00	2.286.496.129,00	93,39

5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	652.655.000,00	457.877.770,00	70,16
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2	274.820.000,00	229.781.070,00	83,61
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	102.800.000,00	78.350.000,00	76,22
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	275.035.000,00	149.746.700,00	54,45
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	15.174.650.857,00	9.742.735.673,00	64,20
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Cakupan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran	1.240.043.802,00	970.415.072,00	78,26
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	97.873.608,00	84.068.964,00	85,90
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS yang disusun	68.546.509,00	52.272.570,00	76,26
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	316.796.821,00	247.653.866,00	78,17
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	543.774.684,00	439.598.526,00	80,84

5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	213.052.180,00	146.821.146,00	68,91
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terkoordinasikan Pengelolaan perbendaharaan Daerah	906.604.445,00	729.869.797,00	80,51
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	258.386.799,00	217.200.886,00	84,06
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	30.564.520,00	23.810.710,00	77,90
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	67.087.550,00	61.319.583,00	91,40
5.02.02.2.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	160.780.203,00	149.192.868,00	92,79
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak	239.824.076,00	157.160.637,00	65,53

	Ketiga (PFK)	Ketiga (PFK)			
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	149.961.297,00	121.185.113,00	80,81
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terkoordinasinya Pelaporan Keuangan Daerah	1.139.977.504,00	903.905.700,00	79,29
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	247.310.122,00	202.782.533,00	82,00
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	214.658.905,00	151.637.858,00	70,64
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	255.130.691,00	250.330.909,00	98,12
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	150.389.599,00	127.078.012,00	84,50

		Kabupaten/Kota			
5 02 02 2 03 11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah aparatus yang mengikuti bimbingan teknis/pelatihan	272 488 187,00	172 076 388,00	63,15
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	11.888.025.106,00	7.138.545.104,00	60,05
5 02 02 2 04 09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Penyediaan Dana Darurat dan Mendesak	11 888 025 106,00	7 138 545 104,00	60,05
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.557.598.189,00	1.166.994.666,00	74,92
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.557.598.189,00	1.166.994.666,00	74,92
5 02 03 2 01 01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang disusun	330 445 986,00	221 961 163,00	67,17
5 02 03 2 01 02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	256 138 008,00	204 261 907,00	79,75
5 02 03 2 01 03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	50 626 173,00	47 048 790,00	92,93
5 02 03 2 01 07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	110 709 320,00	88 236 184,00	79,70
5 02 03 2 01 08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	264 091 918,00	207 451 619,00	78,55
5 02 03 2 01 10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan,	181 980 256,00	109 393 727,00	60,11

	Milik Daerah	dan Penghapusan Barang Milik Daerah			
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	65.161.865,00	59.907.607,00	91,94
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	298.444.663,00	228.733.669,00	76,64
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	4.111.251.920,00	3.689.276.967,00	89,74
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Cakupan Pengelolaan Pendapatan Daerah	4.111.251.920,00	3.689.276.967,00	89,74
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis dan Pengembangan Pajak Daerah, serta penyusunan kebijakan pajak Daerah	70.866.069,00	68.371.086,00	96,48
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak daerah	89.184.500,00	87.306.000,00	97,89
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Peme lihaaran dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	988.944.666,00	943.057.125,00	95,36
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	2.000.000.000,00	1.774.446.000,00	88,72
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	50.000.000,00	34.931.700,00	69,86
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan	Jumlah Layanan			

	Konsultasi Pajak Daerah	dan Konsultasi Pajak	665.397.498,00	582.304.241,00	87,51
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	50.189.908,00	44.537.570,00	88,74
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	101.205.279,00	65.580.245,00	64,80
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	95.464.000,00	88.743.000,00	92,96
	Jumlah		86.246.525.890,00	61.595.126.156,00	71,42

Analisis realisasi anggaran yang telah digunakan antara sub kegiatan dan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. **Terselesainya Ganti Kerugian dan Santunan Tanah**
 1. **Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah**
 1. Jumlah keperluan gedung/kantor Pemko Pematang Siantar, 2 Bidang Tanah dan 403 Jumlah sertifikat tanah milik Pemko, hasil yang dicapai 211,42%
 2. **Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 1. **Tersusunnya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**
 1. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja, hasil yang dicapai 100%
 2. **Penyediaan Administrasi Keuangan**
 1. Jumlah Gaji dan Tunjangan aparatur PNS yang dibayarkan, hasil yang dicapai 100%
 2. Jumlah tugas administrasi tambahan yang dibayar, hasil yang dicapai 100%
 3. Jumlah bulan SPP/SPM yang diverifikasi, hasil yang dicapai

- 100%
4. Jumlah Dokumen untuk Tindak Lanjut Temuan BPK ,, hasil yang dicapai 100%
 3. **Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 1. Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan, hasil yang dicapai 100%
 2. Jumlah Peralatan rumah tangga yang disediakan, hasil yang dicapai 100%
 3. Jumlah Penyediaan bahan Logistik kantor yang disediakan, hasil yang dicapai 100%
 4. Jumlah penyediaan cetakan dan Penggandaan yang disediakan, hasil yang dicapai 100%
 5. Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi, hasil yang dicapai 100%
 6. Jumlah Dokumen Arsip yang dikelola, hasil yang dicapai 100%
 4. **Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 1. Jumlah jasa yang dibayarkan setiap bulannya, hasil yang dicapai 100%
 2. Jumlah pelayanan jasa yang dibayarkan setiap bulan, hasil yang dicapai 100%
 5. **Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**
 1. Jumlah kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2, hasil yang dicapai 100%
 2. Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara, hasil yang dicapai 100%
 3. Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara, hasil yang dicapai 100%
 3. **Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel**
 1. **Cakupan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran**
 1. Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun, hasil yang dicapai 100%
 2. Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS yang disusun, hasil yang dicapai 100%
 3. Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, hasil yang dicapai 100%
 4. Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, hasil yang dicapai 100%
 5. Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran,

hasil yang dicapai 100%

2. Terkoordinasikan Pengelolaan perbendaharaan Daerah

1. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah, hasil yang dicapai 100%
2. Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD, hasil yang dicapai 100%
3. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya, hasil yang dicapai 100%
4. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, hasil yang dicapai 100%
5. Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), hasil yang dicapai 100%
6. Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait, hasil yang dicapai 100%

3. Terkoordinasinya Pelaporan Keuangan Daerah

1. Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban, hasil yang dicapai 100%
2. Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran, hasil yang dicapai 100%
3. Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, hasil yang dicapai 100%
4. Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota, hasil yang dicapai 100%
5. Jumlah aparat yang mengikuti bimbingan teknis/pelatihan, hasil yang dicapai 100%

4. Cakupan urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah

1. Penyediaan Dana Darurat dan Mendesak, hasil yang dicapai 100%

4. Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah

1. Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah

1. Jumlah Standar Harga yang disusun, hasil yang dicapai 100%
 2. Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah, hasil yang dicapai 100%
 3. Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, hasil yang dicapai 100%
 4. Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah, hasil yang dicapai 100%
 5. Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah, hasil yang dicapai 100%
 6. Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah, hasil yang dicapai 100%
 7. Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah, hasil yang dicapai 100%
 8. Jumlah Laporan Barang Milik Daerah, hasil yang dicapai 100%
- 5. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah**
- 1. Cakupan Pengelolaan Pendapatan Daerah**
1. Jumlah Dokumen Hasil Analisis dan Pengembangan Pajak Daerah, serta penyusunan kebijakan pajak Daerah, hasil yang dicapai 100%
 2. Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak daerah, hasil yang dicapai 100%
 3. Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah, hasil yang dicapai 100%
 4. Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya, hasil yang dicapai 100%
 5. Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah, hasil yang dicapai 100%
 6. Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak, hasil yang dicapai 100%
 7. Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi, hasil yang dicapai 100%
 8. Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah, hasil yang dicapai 100%
 9. Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah, hasil yang dicapai 100%

BAB IV PENUTUP

Hasil capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pematangsiantar tersebut adalah hasil usaha nyata dan maksimal yang dapat dilaksanakan tidak hanya Kepala Badan semata tetapi kolektif semua komponen yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pematangsiantar.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2023 ini dibuat sebagai bahan tambahan dalam pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Pematangsiantar.

Pematangsiantar,

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA
PEMATANGSIANTAR**



**ARRI SUASYANDHY SEMBIRING, S.STP, M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19830429 2000112 1 001**